

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN *BUDGET RATCHETING*
TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL
(Bukti Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)**

Lilis Marlina

Universitas Teuku Umar - Meulaboh

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan dan budget ratcheting terhadap alokasi belanja modal. Kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini diukur dari derajat desentralisasi, ketergantungan daerah, kemandirian keuangan, dan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 23 pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan periode pengamatan 5 tahun (2010-2014). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan model data panel. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah (derajat desentralisasi, ketergantungan daerah, kemandirian keuangan, dan efektivitas PAD) dan *budget ratcheting* berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa: (1) kinerja keuangan daerah berupa derajat desentralisasi berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, (2) kinerja keuangan daerah berupa ketergantungan daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, (3) kinerja keuangan daerah berupa kemandirian keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, (4) kinerja keuangan daerah berupa efektivitas PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, (5) *budget ratcheting* berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, *budget ratcheting*, dan belanja modal .

Abstract: This study aimed to examined the effect of financial performance and budget ratcheting on capital expenditure allocation. The regional financial performance in this study is measured by the degree of decentralization, regional dependence, financial independence, and effectiveness of Regional Original Income (PAD). The population used in this study is 23 local government district/urban in the Aceh Province with the observation period of 5 years (2010-2014). The analytical method used in this research is the analysis of multiple linear regression with panel data model. The results of the study simultaneously indicate that regional financial performance (degree of decentralization, regional dependence, financial independence, and effectiveness of PAD and the budget ratcheting affect the allocation of capital expenditure. The results of the study partially show that: (1) regional financial performance i.e of the degree of decentralization had affect on capital expenditure allocation, (2) regional financial i.e local dependency had effect on capital expenditure allocation, (3) regional financial performance i.e financial independence had affect on capital expenditures allocation, (4) regional financial performance i.e of the PAD effectiveness had effect on capital expenditure allocation, (5) budget ratchting had affect on capital expenditure allocation.

Keywords: Financial performance, budget ratcheting, capital expenditure.

PENDAHULUAN

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan otonomi khusus dari pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Provinsi Aceh mendapatkan proporsi pendapatan untuk sumber daya minyak dan gas adalah 70%. Ketetapan ini melebihi otonomi biasa yang mengatur pembagian pendapatan provinsi hanya 15% dari minyak dan 35% dari gas. Pemberian otonomi dan proporsi pendapatan yang cenderung besar ini justru belum mampu menjadikan pemerintah daerah di Provinsi Aceh untuk mengoptimalkan alokasi belanja modal untuk kepentingan publik. Berdasarkan data dari DJPK menunjukkan bahwa rata-rata agregat belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama tahun 2010-2014 masih dibawah 30% yaitu sekitar 7,80% (DJPK, 2014).

Menurut Key (1940) pengalokasian sumber daya merupakan permasalahan mendasar dalam penganggaran sektor publik karena keterbatasan sumber daya (Fozzard, 2001). Disisi lain, pengalokasian sumber daya dalam anggaran belanja proyek pembangunan atau belanja modal (*capital expenditure*) merupakan suatu proses yang sarat dengan kepentingan-keentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan permasalahan di masyarakat (Keefer dan Khemani, 2003; Ablo dan Reinika, 1998).

Salah satu faktor yang dapat membantu pemerintah daerah dalam keputusan pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran seperti belanja modal adalah ukuran kinerja (Mardiasmo, 2002; Amans, 2006; Ammons dan Rivenbark, 2008). Ukuran kinerja yang dapat dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya salah satunya adalah kinerja keuangan (Reck, 2001; Kitching, Roberts, dan Smith, 2012).

Kinerja keuangan daerah dapat diproksikan oleh berbagai indikator seperti rasio derajat desentralisasi (Mahmudi, 2011), ketergantungan daerah (DJPK, 2012, kemandirian keuangan, dan efektivitas PAD (Halim, 2007). Rasio-rasio keuangan tersebut merupakan rasio yang relevan yang dapat digunakan disektor publik, sementara yang lain kurang relevan. Hal ini karena sektor publik bukanlah organisasi yang bertujuan mencari laba.

Curristine, Lonti, dan Joumard (2007) menyatakan bahwa penggunaan informasi kinerja dalam pengambilan keputusan anggaran dapat berkontribusi untuk meningkatkan alokasi dan efisiensi produktif serta disiplin keuangan secara agregat. Di negara-negara OECD informasi kinerja adalah bagian dari proses anggaran, hal ini paling sering digunakan untuk menginformasikan alokasi anggaran bersama dengan informasi lain pada prioritas fiskal dan politik. Oleh karena itu, kinerja keuangan hanya salah satu faktor dalam proses pengambilan keputusan.

Faktor lain yang mempengaruhi alokasi belanja modal adalah *budget ratcheting* (Hercowitz dan Strawczynski, 2002; Lee dan Plummer, 2007). Aranda, Arellano, dan Davila (2010) menjelaskan bahwa efek *ratcheting* ini mencerminkan argumen alternatif dan terjadi ketika varian menguntungkan (tidak menguntungkan) menyebabkan peningkatan (penurunan) target masa depan dibandingkan dengan kinerja masa lalu. Hercowitz dan Strawczynski (2002) juga

menganalisis secara terpisah dari komponen pengeluaran pemerintah yang menunjukkan bahwa siklus *ratcheting* hadir dalam tiga komponen utama yaitu konsumsi pemerintah, transfer dan subsidi, serta belanja modal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kinerja keuangan (derajat desentralisasi, ketergantungan daerah, kemandirian keuangan, dan Efektivitas PAD), dan *budget ratcheting* terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Pembahasan dalam penelitian ini dimulai dengan penjelasan mengenai belanja modal, kinerja keuangan daerah, dan *budget ratcheting*. Pada bagian berikutnya akan dijelaskan hasil penelitian yang berkaitan dengan variabel independen yaitu kinerja keuangan dan *budget ratcheting* yang diprediksi mempengaruhi belanja modal.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran untuk aset, pembelian barang yang berlansung dan akan digunakan selama bertahun-tahun dimasa depan. Dalam kasus pemerintah, contohnya membangun sekolah baru, pembelian *software* baru, membangun jalan dan rumah sakit, dan lain-lain. Belanja modal dapat memiliki masa yang produktif dari beberapa dekade dan membantu memberikan perekonomian yang lebih efisien. Belanja modal berkisar dari proyek-proyek kecil yang dapat diimplementasikan dalam waktu satu tahun. Sedangkan untuk proyek yang lebih kompleks berlansung selama puluhan tahun (Kalemi dan Prodani, 2015).

Menurut Mardiasmo (2002) belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Kelompok belanja ini mencakup jenis belanja baik untuk bagian belanja aparatur daerah maupun pelayanan publik.

Kinerja Keuangan Daerah

Konsep kinerja dipandang sebagai alat untuk pengelolaan sektor publik yang lebih baik, negara tidak bermaksud mencari keuntungan, tetapi untuk kepentingan efisiensi, efektivitas, dan ekonomi. Konsep ini berkembang sebagai gaya baru dalam konsep kebijakan publik. Istilah seperti perencanaan, target, evaluasi, efektivitas biaya, akuntabilitas dan desentralisasi menjadi hal yang lumrah dalam diskursus sektor publik (Ates, 2001). Informasi kinerja dapat berkaitan dengan kinerja keuangan atau kinerja non keuangan (Mardiasmo, 2002). Bahkan *Conceptial Framework Task Force* (2013) menjelaskan bahwa kinerja keuangan adalah ukuran subjektif dari akuntabilitas entitas untuk hasil kebijakan, operasional, dan kegiatan yang diukur dalam aspek keuangan untuk periode yang diidentifikasi.

Halim (2007) menyatakan salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Rasio keuangan tersebut dapat digunakan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatannya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam kontribusi pembentukan pendapatan

daerah, melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Budget Ratcheting

Salah satu aspek yang meresap dalam pengaturan target adalah efek *ratcheting* yang terjadi ketika target untuk tahun berjalan dipengaruhi oleh perbedaan antara kinerja tahun lalu dan targetnya (Aranda, Arellano, dan Davila, 2010). "*Prinsip ratchet*" mengacu pada kecenderungan menggunakan kinerja saat ini sebagai kriteria dalam menentukan tujuan masa depan, dan juga mengacu pada kecenderungan kinerja standar meningkat setelah periode kinerja yang baik (Lee, 2013).

Weitzman (1980) menyatakan kinerja saat ini bertindak seperti roda gigi berlekuk dalam memperbaiki titik tolak untuk target periode berikutnya. Lee dan Plummer (2007) menemukan bahwa anggaran pemerintah untuk sekolah kabupaten mengalami *ratchet*. Mereka menemukan bahwa kelebihan belanja tahun sebelumnya menyebabkan peningkatan belanja yang dianggarkan lebih besar pada tahun berikutnya.

METODELOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah 23 pemerintah daerah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Aceh. Populasi yang diteliti termasuk kecil, maka pengambilan sampel tidak dilakukan karena tidak dapat mewakili populasi dan nilai-nilai yang dihitung berdasarkan sampel tidak tepat sebagai perkiraan dari nilai-nilai populasi (Cooper dan Schinder; 114). Adapun sasaran populasi penelitian ini menggunakan jenis data yang seimbang (*balanced panel data*). Menurut Gujarati (2003; 638), data panel yang seimbang adalah data panel yang setiap unit objek (*cross section*) mempunyai jumlah data periode (*time series*) yang sama dengan periode pengamatan 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2010-2014. Pada tahap selanjutnya 23 pemerintah kabupaten/kota Provinsi Aceh akan dikalikan dengan 5 tahun periode pengamatan (2010-2014) sehingga jumlah akhir yang diobservasi sebanyak 115 pengamatan penelitian.

Operasional Variabel

Variabel Independen

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah kinerja keuangan daerah yang indikatornya terdiri dari: derajat desentralisasi, ketergantungan daerah, kemandirian keuangan, efektivitas PAD dan *budget ratcheting* yang dijelaskan sebagai berikut:

(1) Derajat desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah (Mahmudi, 2011;169).

(2) Ketergantungan daerah

Mahmudi (2007:128) menyatakan ketergantungan daerah merupakan rasio keuangan yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah.

(3) Kemandirian keuangan

Kemandirian keuangan menggambarkan perbandingan jumlah penerimaan PAD dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat atau provinsi serta pinjaman daerah (Mahmudi, 2007;128)

(4) Efektivitas PAD

Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007:23).

(5) *Budget ratcheting*

Budget ratcheting merupakan penentuan anggaran tahun berjalan dipengaruhi oleh perbedaan antara realisasi anggaran tahun lalu dan targetnya. Formulasi untuk model *budget ratcheting* adalah sebagai berikut (Weitzman, 1980; Lee dan Plummer, 2007):

$$(B_t - B_{t-1})/B_{t-1} = \delta/B_{t-1} + \lambda (A_{t-1} - B_{t-1})/B_{t-1}.$$

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah alokasi belanja modal yang didefinisikan sebagai alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dibandingkan dengan total belanja dalam APBD.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan model data panel. Model persamaan regresinya sebagai berikut:

$$BM_{it} = \beta_0 + \beta_1 DD_{it} + \beta_2 KD_{it} + \beta_3 KK_{it} + \beta_4 EPAD_{it} + \beta_5 BR_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

- DD (X₁) : Derajat desentralisasi
- KD (X₂) : Ketergantungan daerah
- KK (X₃) : Kemandirian keuangan
- EPAD (X₄) : Efektivitas PAD
- BR (X₅) : *Budget ratcheting*
- BM (Y) : Alokasi belanja modal
- β₀ : Kkonstanta
- β₁- β₅ : Koefisien regresi masing-masing variabel independen
- e : standar error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

Untuk menentukan pendekatan/metode dalam estimasi regresi data panel, prosedur yang harus dilakukan dalam estimasi regresi data panel adalah (1) uji *Chow* untuk memilih antara pendekatan *Pooled Least Square* (PLS) dan *Fixed Effect Model* (FEM); (2) uji *Hausman* untuk memilih antara pendekatan FEM dan *Random Effect Model* (REM).

(1) Uji *Chow*

Hipotesis yang diajukan untuk uji *Chow* adalah:

H₀ : model PLS

H₁ : model FEM

Hasil uji *Chow* diperlihatkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1: Uji Chow

Redundent Fixed Effects Tests			
Pool: FEM			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	4.23	(22,87)	0.000
Cross-section Chi-square	83.78	22	0.000

Berdasarkan hasil uji *Chow* yang ditunjuk pada tabel 1 diatas, terlihat bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu $4,23 > 1,76$ atau *p-value* lebih kecil dari α (0,05) yaitu $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 yang menyatakan bahwa estimasi menggunakan model PLS ditolak. Dengan demikian, keputusan sementara adalah menggunakan model FEM.

(2) Uji *Hausman*

Hipotesis yang diajukan untuk uji *Hausman* adalah:

H_0 : model REM

H_1 : model FEM

Hasil uji *Hausman* ditampilkan pada Tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2 : Uji *Hausman*

Correlated Random Effects – Hausman Test			
Pool : HAUSMAN			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq.d.f	Prob.
Cross-section random	20.30	5	0.001

Berdasarkan hasil uji *Hausman* yang ditunjukkan pada tabel 2 diatas, terlihat bahwa nilai *chi square* hitung lebih besar dari nilai *chi square* tabel yaitu $20,20 > 0,7107$ atau nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0.05, yaitu $0,001 < 0,005$ sehingga H_0 ditolak. Dengan kata lain, metode yang paling baik untuk estimasi data panel dalam penelitian ini adalah berdasarkan uji *Hausman* adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Berdasarkan *output* estimas regresi data panel dengan metode *Fixed Effect Model* (FEM) dibentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$BM_{it} = 0,158 \cdot DD_{it} + 0,077KD_{it} + 0,437KK_{it} + 0,043EPAD_{it} + 0,496BR_{it} + e_{it}$$

Pembahasan

Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Pengujian hipotesis secara simultan dilakukan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan daerah (derajat desentralisasi, ketergantungan daerah, kemandirian keuangan, efektivitas (PAD) dan *budget ratcheting* terhadap aloksi belanja modal. Hasil penelitian dilakukan dengan melihat koefisien regresi (β). Jika paling sedikit ada satu β_i ($i = 1,2,3,4,5$) $\neq 0$. Berdasarkan nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berupa derajat

desentralisasi, ketergantungan daerah, kemandirian keuangan, efektivitas PAD) dan *budget ratcheting* tidak sama dengan nol ($\beta_i \neq 0, 1, 2, 3, 4, 5$).

Dengan demikian kinerja keuangan daerah berupa derajat desentralisasi, ketergantungan daerah, kemandirian keuangan, efektivitas PAD) dan *budget ratcheting* secara simultan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Hasil Pengujian Secara Parsial

Hasil pengujian regresi menunjukkan nilai koefisien regresi pengaruh kinerja keuangan daerah berupa derajat desentralisasi terhadap alokasi belanja modal sebesar -0,103. Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis, syarat untuk menyatakan kinerja keuangan daerah berupa derajat desentralisasi berpengaruh terhadap alokasi belanja modal apabila $\beta_1 \neq 0$. Mengaju pada syarat tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan daerah berupa derajat desentralisasi secara parsial berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Lucky (2013) yang membuktikan bahwa derajat desentralisasi fiskal memiliki pengaruh idak langsung terhadap belanja modal. Begitu pun dengan Arsa (2015) membuktikan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah.

Hasil pengujian regresi menunjukkan nilai koefisien regresi pengaruh kinerja keuangan daerah berupa ketergantungan daerah terhadap alokasi belanja modal sebesar 0,077. Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis, syarat untuk menyatakan kinerja keuangan daerah berupa ketergantungan daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal apabila $\beta_2 \neq 0$. Mengaju pada syarat tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan daerah berupa ketergantungan daerah secara parsial berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sularso dan Restianto (2011) menunjukkan bahwa ketergantungan daerah secara langsung berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. Sejalan dengan pendapat tersebut, hasil penelitian Arsa (2015) menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal.

Hasil pengujian regresi menunjukkan nilai koefisien regresi pengaruh kinerja keuangan daerah berupa kemandirian keuangan terhadap alokasi belanja modal sebesar 0,437. Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis, syarat untuk menyatakan kinerja keuangan daerah berupa kemandirian keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal apabila $\beta_3 \neq 0$. Mengaju pada syarat tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan daerah berupa kemandirian keuangan secara parsial berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sularso dan Restianto (2011) membuktikan bahwa kemandirian keuangan terhadap alokasi belanja modal. Mahmudi (2007: 122) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, melakukan investasi pembangunan jangka panjang.

Hasil pengujian regresi menunjukkan nilai koefisien regresi pengaruh kinerja keuangan daerah berupa efektivitas PAD terhadap alokasi belanja modal sebesar 0,043. Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis, syarat untuk menyatakan kinerja keuangan berupa efektivitas PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal apabila $\beta_4 \neq 0$. Mengaju pada syarat tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan daerah berupa efektivitas PAD secara parsial berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sularso dan Restianto (2011) dan Arsa (2015) membuktikan bahwa efektivitas PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi pengaruh *budget ratcheting* terhadap alokasi belanja modal sebesar -0,496. Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis, syarat untuk menyatakan *budget ratcheting* berpengaruh terhadap alokasi belanja modal apabila $\beta_4 \neq 0$. Mengaju pada syarat tersebut dapat dikatakan bahwa *budget ratcheting* secara parsial berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Menurunnya alokasi belanja modal ini disebabkan oleh varian negatif dari selisih belanja daerah aktual tahun lalu dengan anggaran belanja daerah tahun berjalan. Hal ini konsisten dengan teori, Leone dan Rock (2001) yang menyatakan bahwa *ratcheting* terjadi ketika varian positif dalam kinerja dari anggaran yang menggiring pada perubahan yang lebih besar dalam anggaran tahun berikutnya dibandingkan perubahan yang berhubungan dengan anggaran varian negatif yang besarnya sama.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hercowitz dan Strawczynski (2002), Lee dan Plummer (2007). Temuan Hercowitz dan Strawczynski (2002) menunjukkan bahwa perubahan siklus dalam komposisi pengeluaran pemerintah (konsumsi pemerintah, transfer dan subsidi, serta belanja modal) yang disebabkan oleh siklus *ratcheting* dalam anggaran pemerintah. Lee dan Plummer (2007) membuktikan bahwa kelebihan belanja daerah tahun sebelumnya menyebabkan peningkatan belanja yang dianggarkan lebih besar pada tahun berikutnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan daerah berupa derajat desentralisasi, ketergantungan daerah, kemandirian keuangan, efektivitas PAD) dan *budget ratcheting* secara simultan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
2. Kinerja keuangan daerah berupa derajat desentralisasi secara parsial berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
3. Kinerja keuangan daerah berupa ketergantungan daerah secara parsial berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
4. Kinerja keuangan daerah berupa kemandirian keuangan secara parsial berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
5. Kinerja keuangan daerah berupa efektivitas PAD secara parsial berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
6. *Budget ratcheting* secara parsial berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka disarankan sebagai berikut:

- 1) kepada pemerintah kabupaten/kota:
 - a. untuk dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah, karena hal ini dapat berdampak pada peningkatan alokasi belanja modal yang dapat digunakan untuk pelayanan publik. Peningkatan kinerja keuangan yang baik dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memfokuskan pada upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali potensi dan sumber daya daerah yang belum dimanfaatkan dengan maksimal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian daerah, efektivitas PAD, serta dapat mengurangi ketergantungan daerah pada pemerintah pusat dan/atau provinsi.
 - b. Agar membuat kebijakan atau skala prioritas pembangunan fisik yang dianggarkan untuk belanja modal daerah sehingga sinkron dengan kebijakan penggunaan dana migas dan otsus di seluruh kabupaten/kota Provinsi Aceh.
 - c. Agar dalam proses penyusunan APBD dapat menganalisis efek *ratcheting* yang terjadi dalam besaran anggaran daerah sebagai acuan dalam menetapkan target pendapatan dan belanja daerah. Sehingga pemerintah kabupaten/kota dapat lebih proposional dalam mengalokasikan anggaran belanja modal.
- 2) kepada peneliti yang tertarik dibidang ini, disarankan:
 - a. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan instrumen kuesioner dan melakukan pengamatan langsung ke pemerintah daerah, serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan menggunakan model pendekatan kualitatif.
 - b. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada kabupaten/kota yang lainnya di seluruh provinsi Indonesia dengan waktu yang lebih panjang misalnya tujuh tahun, sehingga hasil penelitiannya lebih representatif.
 - c. Menguji variabel lainnya yang diduga berpengaruh terhadap alokasi belanja modal seperti DAU, DAK, pajak daerah dan tarifnya, retribusi daerah, dan korupsi, dan juga dapat menambahkan rasio keuangan lainnya yang diperkirakan dapat mempengaruhi alokasi belanja modal.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ablo, E., dan Reinikka, R. 1998. Do budget really matter? Evidence from public spending on education and health care in Uganda. *Policy Research Paper* 1926. World Bank.
- Ates, H. 2001. Using Performance Indicators in Public Administration: Lesson From The British Experience. *Suleyman Demirel Universitesi*. <http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/iibfd/article/viewFile/2455/2200>.
- Arsa, I.K. 2015. *Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2006 s.d 2013*. *Tesis Tidak Dipublikasikan*. Universitas Udayana. Denpasar.
- Cooper, Donald R & Pamela S. Schinder. 2006. *Business Research Methods*. 9th Editions. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.

- Curristine, T.Z.L., dan Isabelle J. 2007. Improving Public Sector Efficiency: Challenges and Opportunities. **OECD Journal on Budgeting** Vol.7(1). <http://www.oecd.org/gov/budgeting/43412680>.
- Conceptual Framework Task Force.2012. Measuring Financial Performance in Public Sector Financial Statements. *Consultation Paper 2*.
- DJPK. (2012). **Deskripsi dan Analisis APBD 2014**. Kemenkeu RI.
- (2014). **Deskripsi dan Analisis APBD 2014**. Kemenkeu RI.
- Fozzard, A. 2001. The Basic Budgeting Problem Approaches to Resource Allocation in the Public Sector and their Implications for Pro-Poor Budgeting. **Working Paper 147**.
- Gujarati, Damodar. 2003. **Ekonometrika Dasar**. Edisi Keenam. Erlangga: Jakarta.
- Halim, A. 2007. **Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah**. Jakarta: Salemba Empat.
- Keefer, P., dan Stuti K. 2003. The political economy of public expenditures. Background paper for WDR 2004: Making Service Work for Poor People. *The World Bank*.
- Kitching, Karen.A., Andrea A.R., dan Pamela C.S. 2012, Nonprofit Resource Allocation Decisions: A Study of Marginal versus Average Spending. **Journal of Governmental & Nonprofit Accounting**, 1, 1-19.
- Kalemi, Vanina & Gelardina Prodani. 2015. The Impact of Macroeconomic Factors in Public Capital Expenditure in Albania. **European Journal of Sustainable Development**, 4 (1), 51-62.
- Lucky, D. 2013. Analysis Of The Effect Of Regional Financial Performance To Economic Growth and Poverty Through Capital Expenditure (Case study of 38 Regencies/Cities in East Java Province). **Journal of Economics and Sustainable Development**, Vol.4(19). <http://www.iiste.org/Journals/index.php/>.
- Mardiasmo. 2002. **Akuntansi Sektor Publik**. Andi Offset: Yogyakarta.
- Mahmudi. 2007. **Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Mahmudi. 2011. **Akuntansi Sektor Publik**. UII Press: Yogyakarta.
- Reck, J.L. 2001. The Usefulness Of Financial and Nonfinancial Performance Information in Resource Allocation Decisions. **Journal of Accounting and Public Policy**, 20, 45-71.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sularso, Hdan Yanuar E. R. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. ***Media Riset Akuntansi***, 1 (2), 109-124.